

# HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

## KLIPING

**KLASIFIKASI** : Universitas Indonesia - Penulis  
**TEMA** : Bad Corporate Governance, Kasus Amerika Serikat dan Indonesia  
**SURAT KABAR/MAJALAH** : Media Indonesia

Hari Rabu Tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2002 Halaman 13 Kolom 2

### RINGKASAN

Praktik korporasi di Amerika Serikat menunjukkan penyimpangan gara-gara akuntansi yang mestinya menjadi bahasa dan alat komunikasi yang netral dalam dunia bisnis, telah mengalami dekadensi dengan sejumlah penyelewengan dan pemutarbalikan fakta. Ditambah lagi kadar mental dan etika manusia sebagai hewan ekonomi yang telah mencapai titik nadirnya. Akhirnya, kita amati pada media massa, baik di dalam maupun luar negeri, korporasi Amerika Serikat sedang mengalami penurunan krisis kepercayaan yang cukup serius. Berbagai macam praktik menyimpang diterapkan oleh korporasi-korporasi yang pada masa kejayaannya dianggap sebagai *role model* bagi aktor bisnis di seluruh dunia. Kasus *WorldCom* yang menyusul Enron yang tadinya dianggap hanya *some bad apples* menurut istilah George Bush Jr di kancah bisnis yang bergelimang begitu banyak aliran dana. Tetapi semakin lama dikhawatirkan bahwa permasalahannya adalah kebobrokan sistem (*entire free enterprise system*). Oleh karenanya, Presiden Bush Jr terpaksa berbicara di depan *Wall Street* yang menandakan bahwa kekhawatirannya sudah semakin memuncak (*The Economist, July 2002, Corporate Scandals and Politics The Backlash against Business*). Terbukti akhirnya pidato tersebut tidak mampu menepis makin tipisnya kepercayaan investor dari waktu ke waktu ditandai dengan makin memburuknya indeks harga saham di hari-hari berikutnya. Di Indonesia sendiri praktik bisnis yang melanggar kaidah *good governance* bukan merupakan suatu isu baru. Meminjam analogi berpikir dari Professor Krugman, terdapat beberapa strategi korporasi di Indonesia yang menyimpang dan sudah menjadi rahasia umum. Dengan melakukan penyuapan kepada pejabat negara, suatu korporasi dapat memperoleh proyek tanpa melalui proses tender. Walaupun harus tender, pemenangnya adalah korporasi yang telah membayar “upeti” paling besar. Akibatnya adalah negara harus membayar suatu proyek yang harganya sudah mencakup biaya “upeti” dan margin keuntungan, yang eringkali tidak rasional. Demikian yang disampaikan Vishnu Juwono/Ubaidillah Nugraha. Mahasiswa Pascasarjana di Columbia University, New York, AS/Periset pada Boston Consulting Group, Indonesia.

### CATATAN :

**Bad Corporate Governance,**

**Kasus Amerika Serikat**

**dan Indonesia**

Mahasiswa pascasarjana di Columbia University, New York,  
AS/Periset pada Boston Consulting Group, Indonesia

**P**RAKTIK korporasi di Amerika Serikat menunjukkan penyimpangan gara-gara akuntansi yang mestinya menjadi bahasa dan alat komunikasi yang netral dalam dunia bisnis, telah mengalami dekadensi dengan sejumlah penyelenggaraan dan pemutabalikan fakta. Ditambah lagi dengan kadar mental dan etika manusia sebagai hewan ekonomi yang telah mencapai titik nadirnya. Akhirnya, kita amati pada media massa, baik di dalam maupun luar negeri, korporasi Amerika Serikat sedang mengalami penurunan krisis kepercayaan yang cukup serius. Berbagai macam praktik 'menyimpang' diterapkan oleh korporasi-korporasi yang pada masa kejayaannya dianggap sebagai *role model* bagi aktor bisnis di seluruh dunia. Kasus WorldCom yang menyusul Enron tadinya dianggap hanya *some bad apples* menurut istilah George Bush Jr di kancah bisnis yang bergelombang begitu banyak aliran dana. Tetapi semakin lama dikhawatirkan bahwa permasalahannya adalah kebobrokan sistem (*entire free enterprise system*). Oleh karenanya, Presiden Bush Jr terpaksa berbicara di depan Wall Street yang menandakan bahwa kekhawatirannya sudah semakin memuncak (*The Economist*, July 2002, *Corporate Scandals and Politics The Backlash against Business*). Terbukti akhirnya pidato tersebut tidak mampu menepis makin tipisnya kepercayaan investor dari waktu ke waktu ditandai dengan makin memburuknya indeks harga saham di hari-hari berikutnya. Banyak media yang dengan sinis melontarkan kenyataan pahit *can trust rebuilt?*, sebuah pertanyaan yang tajam sekaligus memprihatinkan dan sulit untuk dijawab segera.

Profesor Paul Krugman dari Princeton University, AS, mengungkapkan ada tiga metode penyimpangan yang dipraktikkan oleh korporasi-korporasi multinasional. *Pertama*, praktik penyimpangan model Enron. Korporasi menandatangani kontrak penyediaan jasa/barang untuk 30 tahun mendatang. Dengan sengaja korporasi mencantumkan biaya produksi dan penjualan lebih rendah; ditambah lagi korporasi mencantumkan proyeksi keuntungan untuk 30 tahun mendatang pada laporan keuangan tahun ini. Akibatnya, korporasi terlihat sangat menguntungkan dan nilai sahamnya akan terdongkrak.

*Kedua*, model penyimpangan Adelphy. Korporasi membuat kontrak dengan pelanggan, dan berusaha menggiring investor untuk memusatkan perhatiannya pada volume penjualan daripada keuntungannya, sehingga korporasi cenderung menciptakan pelanggan fiktif, karena yang diperhatikan investor hanya volume penjualan saja. Metode yang terakhir adalah yang digunakan oleh Worldcom. Pada kasus ini tidak terciptanya penjualan fiktif, tetapi yang dilakukan adalah menghilangkan biaya operasi dengan memasukkannya pada harga pembelian aset. Akibatnya, korporasi yang secara bisnis tidak menguntungkan terlihat menguntungkan pada laporan keuangannya.

Akibatnya, timbul pertanyaan mengapa korporasi tersebut bersusah payah melakukan praktik curang ini? Apakah mereka tidak sadar bahwa tindakannya justru akan merusak korporasi dalam jangka panjang? Bila ditelusuri dalam lingkup internal korporasi dapat dipahami bagaimana para *chief executive officer* (CEO) dengan penuh kesadaran melakukan praktik-praktik tersebut. Hal ini terkait dengan kompensasi yang diterimanya dalam bentuk *stock option*.

Logikanya, dengan memanipulasi performa keuangannya, nilai saham korporasi akan terdongkrak karena pasar berpersepsi bahwa usahanya sangat menguntungkan. Dengan adanya inflasi nilai saham tersebut, eksekutif korporasi akan memutuskan memberikan *stock option*, biasanya melalui rapat *board of direc-*

*tors*, dan menguangkannya sebagai bonus akhir tahun atas 'kinerja' korporasi yang baik, sehingga tidak mengherankan para CEO di korporasi multinasional, seperti Jack Welch dari General Electric, Kenneth Lay dari Enron, dan Bernard Ebbs dari Worldcom, memperoleh bonus dalam bentuk *stock option* yang nilainya bisa mencapai kurang lebih 3 kali dari gaji pokoknya ditambah dengan bonus.

#### Praktik korporasi di Indonesia

Pernyataan Ketua BKPM Theo F Toemion bahwa Indonesia dikenal lemah dalam penerapan *governance*, baik pada sektor pemerintahan maupun perusahaan, perlu dicamkan, diwaspadai, dan dicermati. Dalam kondisi demikian, kata Toemion, Indonesia tetap saja masih menerima *capital inflow* yang besar. Nilai dari approved Foreign Direct Investment (FDI) selain masa krisis 1997-1999, masih menunjukkan peningkatan, dari US\$10.9 miliar pada 1999 menjadi US\$14.4 miliar pada 2000 (EIU, Indonesia Country Forecast 2001-2002). Angka yang menunjukkan bahwa kredibilitas mental dan perangkat hukum yang memprihatinkan belum merupakan hambatan yang besar dalam pertumbuhan sektor korporasi. Akan tetapi, efek tersebut mengakumulasi dalam bentuk distorsi lain dan pecah dalam bentuk krisis.

Mungkin benar apa yang dikatakan ekonom Dr Sjahrir bahwa di negara maju, terutama AS,

dengan harga yang amat mahal akibat *mark-up* berlebihan, sehingga memberi efek pada biaya operasi dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi korporasi tersebut.

Dalam kasus aset yang sekarang parkir di BPPN, kalau kita berkilas balik beberapa tahun sebelumnya, banyak di antaranya dapat diklasifikasikan perusahaan dengan kinerja gilang gemilang. Sebagian masuk bursa dan tentunya tidak lupa predikat 'wajar tanpa syarat' sudah berada di tangan dari para akuntan publik.

Tetapi krisis datang dan menghenyakkan karena nilai aset sebenarnya jauh dari yang tercatat. Telah terjadi penggelembungan aset, satu dari sekian jasa yang bisa diberikan akuntan di samping *fraud-fraud* lainnya. Lalu di mana posisi *good corporate governance* (GCG)?

Beberapa agenda penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal dan komunitas keuangan, yang saat ini dibahas oleh kongres, regulator pasar modal, berbagai pimpinan korporasi, seperti yang dirangkum oleh dekan The Yale School of Management, Jeffrey Garten, adalah *pertama*, meregulasi para auditor. Komisi pengawasan yang baru harus dibentuk dan komisi ini bertanggung jawab kepada regulator pasar modal. Komisi ini bertugas menetapkan *standard auditing*, memberi izin auditor dan memunyai wewenang untuk menghukum para auditor yang

### Sangat tidak adil apabila kesalahan beberapa korporasi, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia, menyebabkan kita mengambil kesimpulan bahwa seluruh sistem keuangan, pasar modal, bahkan perekonomian tidak dapat dipercaya. Masih banyak korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat yang menganut *good corporate governance*.

telah terjadi mekanisme penyesuaian diri sendiri (*fine tuning*) yang cukup baik. Ketika skandal muncul, otomatis di bursa terjadi skandal yang ditanggapi sepi pada sisi penegakan hukumnya, tapi lama-kelamaan tidak tertahankan dan akhirnya meledak.

Di Indonesia sendiri praktik bisnis yang melanggar kaidah *good governance* bukan merupakan suatu isu baru. Meminjam analogi berpikir dari Professor Krugman, terdapat beberapa strategi korporasi di Indonesia yang menyimpang dan sudah menjadi rahasia umum. Dengan melakukan penyuaian kepada pejabat negara, suatu korporasi dapat memperoleh proyek tanpa melalui proses tender. Kalaupun harus tender, pemenangnya adalah korporasi yang telah membayar 'upeti' paling besar. Akibatnya adalah negara harus membayar suatu proyek yang harganya sudah mencakup biaya 'upeti' dan margin keuntungan, yang seringkali tidak rasional.

Metode *kedua*, seorang pejabat menggunakan kekuasaannya untuk memberikan monopoli dan/atau fasilitas kepada pengusaha yang merupakan kerabat dekat, kroni, atau rekanan, sehingga pengusaha tersebut dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar walaupun operasinya tidak efisien, akibat dilindungi oleh monopoli/fasilitas tersebut. Tentu kita masih ingat bagaimana anak seorang presiden rezim Orde Baru memperoleh monopoli cengkeh dan proyek mobil nasional, yang mengakibatkan negara dirugikan triliunan rupiah.

Dan terakhir adalah metode pemerahan badan usaha milik negara (BUMN). Para pengusaha yang didukung penguasa mendapatkan kontrak sebagai *supplier* maupun distributor

membandel. Untuk menjamin independensi komisi ini, segala kebutuhannya harus dibiayai merata oleh seluruh korporasi yang terdaftar pada pasar modal.

*Kedua*, memperbaiki kompensasi CEO/presiden direktur. Besarnya nilai *stock option*/saham, kemudian tidak dimasukkan pada biaya korporasi, mendorong eksekutif untuk menggunakan segala cara untuk menaikkan harga saham dalam jangka pendek. Di masa mendatang, kompensasi dalam bentuk saham tidak boleh diuangkan pada saat nilai saham di bawah nilai indeks saham gabungan. Selain itu, apabila saham tersebut diuangkan, harus dimasukkan sebagai biaya korporasi.

*Ketiga*, membuat presiden direktur dan dewan direksi lebih bertanggung jawab. Regulator pasar modal harus membuat suatu pedoman umum bagi seluruh korporasi yang terdaftar di pasar modal. Di dalam pedoman tersebut, para direktur utama dan direktur keuangan secara pribadi menjamin bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan secara akurat menggambarkan posisi keuangan korporasi, termasuk tren yang dipresentasikannya. Kecuali itu, juga memberikan tekanan kepada komunitas keuangan. Korporasi yang beroperasi di bidang keuangan atau pasar modal pada saat ini menghadapi masalah konflik kepentingan. Para analis pasar modal ditekan dan diberi kompensasi untuk merekomendasikan saham karena saham korporasi tersebut adalah klien tempat analis itu bekerja. Sampai dikeluarkan peraturan yang jelas mengenai pemisahan antara fungsi analis dan bankir investasi, seyogianya regulator pasar modal harus memonitor dan melaporkannya kepada publik secara

berkala mengenai aktivitas bank investasi.

### Bagaimana dengan Indonesia?

Kondisi pasar modal dan pasar uang di Indonesia sepertinya setali tiga uang dengan di Amerika Serikat. Pernyataan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) Indonesia Herwidyatmo, yang meragukan praktik penyelenggaraan akuntansi di Amerika Serikat tidak terjadi di Indonesia, karena kedua negara ini menggunakan sistem akuntansi yang berbeda, sepenuhnya tidak benar. Sepuluh korporasi akuntan publik yang melakukan audit terhadap 37 bank sebelum krisis keuangan di Indonesia, mereka memberikan status sebagai 'wajar tanpa syarat' (*Bisnis Indonesia*, 3/7/2002). Selain itu, pada masa kejayaan pasar modal korporasi-korporasi milik kerabat dekat pejabat, kroni, dan rekanan mendapatkan suntikan dana cukup besar dari publik melalui pasar modal. Para auditor, bankir investasi, otoritas pasar modal, pejabat tinggi bidang ekuiin, pada waktu itu setidaknya mengetahui dengan jelas karakteristik korporasi tersebut, yang tidak mengindahkan prinsip *good corporate governance*, kehati-kehatian, dan manajemen risiko. Konsekuensinya adalah kerugian besar yang diderita oleh investor/publik akibat penurunan nilai saham secara drastis karena korporasi tersebut terlibat utang yang besar atau rugi karena kehilangan *privilege*-nya. Tidak perlu kita terlalu ambisius untuk menerapkan agenda yang dirangkum oleh Jeffrey A Garten. Sebagai langkah awal, sebaiknya infrastruktur pasar modal dan sistem keuangan perlu dibenahi. Perangkat aturan pasar modal dan keuangan yang jelas, tenaga finansial kompeten, teknologi informasi yang *up to date*, peradilan niaga yang kredibel, tenaga hukum niaga yang terampil, transparansi akan kondisi keuangan perusahaan, merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi agar sistem keuangan dan pasar modal di Indonesia dapat berfungsi optimal.

Sangat tidak adil apabila kesalahan beberapa korporasi, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia, menyebabkan kita mengambil kesimpulan bahwa seluruh sistem keuangan, pasar modal, bahkan perekonomian tidak dapat dipercaya. Masih banyak korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat yang menganut *good corporate governance*. Meski juga tidak sedikit yang masih menjadikannya sekadar keharusan bukan kebutuhan. Dari hasil survei IICG (Indonesian Institute of Corporate Governance) tentang persepsi GCG di Indonesia dalam bentuk Good Corporate Government Perception Index (*Swasembada*, Oktober 2001), terkuak bahwa pada perusahaan-perusahaan *go public* saja, yang notabene punya tanggung jawab kepada publik dan kebetulan menjadi responden survei ini, ternyata tidak semuanya *concern* terhadap GCG. Peran komisaris independen masih sebatas pajangan saja, substansi yang seharusnya dicapai, yaitu penilaian seorang komisaris yang sama sekali tidak terkait dengan manajemen baik yang baru ataupun lampau, tampaknya masih jauh panggang dari api. Indikator lain yang dapat ditemukan dari survei tersebut ternyata hanya 9 dari 52 perusahaan yang memiliki buku petunjuk pelaksanaan GCG. Bukti masih rendahnya upaya perusahaan dalam menjadikan keunggulan GCG sebagai investasi jangka panjang.

Secara jujur harus diakui bahwa dibandingkan dengan komunitas politik, baik itu komunitas lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga internasional, maka komunitas bisnis memunyai suatu sistem yang lebih jelas peraturannya, lebih jelas pertanggungjawabannya, dan *enforcement*-nya relatif berjalan. Oleh karena itu, kredibilitas dan tingkat kepercayaan terhadap korporasi harus diselamatkan, sehingga tetap menjadi *benchmark* bagi praktik *good governance* di Amerika Serikat dan tentunya juga di Indonesia.\*\*\*